

**IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA LANJUT USIA DI DINAS
SOSIAL KABUPATEN NGADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Maria Theresia Paba

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
milapaba2@gmail.com

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
didin@untag-sby.ac.id

Radjikan

Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
radjikan@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Peningkatan jumlah lanjut usia di Kabupaten Ngada berdampak pada meningkatnya permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya bagi lansia yang tergolong miskin dan terlantar. Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Ngada melaksanakan Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi lanjut usia sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan keberfungsian sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program rehabilitasi PMKS pada lanjut usia di Dinas Sosial Kabupaten Ngada. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan sumber data primer dan sekunder. Analisis penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program rehabilitasi PMKS bagi lanjut usia telah berjalan, namun belum optimal. Program memiliki tujuan yang jelas, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya, keterlambatan penyaluran bantuan, lemahnya komunikasi kepada masyarakat sasaran, serta belum adanya regulasi daerah khusus. Kesimpulannya, keberhasilan program dipengaruhi oleh dukungan kebijakan pusat, namun memerlukan penguatan sumber daya, komunikasi, dan kebijakan daerah agar pelaksanaannya lebih efektif dan merata.

Kata Kunci: *Lanjut Usia, Rehabilitasi Sosial, PMKS*

ABSTRACT

The increasing number of elderly people in Ngada Regency has resulted in increased social welfare issues, particularly for those considered poor and neglected. The government, through the Ngada Regency Social Services Office, is implementing the Social Welfare Rehabilitation Program (PMKS) for elderly people as an effort to meet basic needs and improve social functioning. The increasing number of elderly people in Ngada Regency has resulted in increased social welfare issues, particularly for those considered poor and neglected. The government, through the Ngada Regency Social Services Office, is implementing the Social Welfare Rehabilitation Program (PMKS) for elderly people as an effort to meet basic needs and improve social functioning. The program has clear objectives, but still faces challenges such as limited resources, delays in aid distribution, weak communication with target communities, and the absence of specific regional regulations. In conclusion, the program's success is influenced by central policy support, but requires strengthening of resources, communication, and regional policies for more effective and equitable implementation.

Keywords: *Elderly, Social Rehabilitation, PMKS*

A. PENDAHULUAN

Masalah kesejahteraan sosial pada lanjut usia merupakan isu strategis dalam pembangunan sosial yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia. Kelompok lanjut usia termasuk dalam kategori penduduk rentan karena mengalami penurunan kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang berdampak pada keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Kondisi tersebut menjadi lebih kompleks di wilayah dengan karakteristik geografis yang berat, terpencil, dan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti Kabupaten Ngada. Faktor keterisolasian wilayah, kondisi infrastruktur yang belum merata, serta keterbatasan sarana kesehatan dan sosial turut memperbesar risiko kerentanan sosial pada kelompok lanjut usia. Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menjamin terpenuhinya hak-hak lanjut usia melalui berbagai kebijakan dan program sosial. Salah satu bentuk intervensi pemerintah adalah melalui Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang bertujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial, kemandirian, dan kualitas hidup lanjut usia. Di tingkat daerah, pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam bidang kesejahteraan sosial.

Namun demikian, implementasi program rehabilitasi sosial bagi lanjut usia di daerah seringkali belum berjalan secara optimal. Berbagai kendala masih ditemukan, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, hingga persoalan validitas data sasaran. Selain itu, faktor sosial dan budaya masyarakat, rendahnya partisipasi keluarga, serta keterbatasan akses transportasi dan komunikasi di wilayah pedesaan turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Kondisi tersebut berpotensi

menimbulkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realitas pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi Program Rehabilitasi Sosial bagi lanjut usia di Dinas Sosial Kabupaten Ngada, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian kebijakan sosial, serta secara praktis menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan sosial bagi lanjut usia.

B. KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik

Menurut Fredrich dalam Agustino (2017: 166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan. Menurut Dunn (1994) sistem kebijakan (policy system) mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan karena tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, kemudian program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap untuk proses pelaksanaannya dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan yang diinginkan. Kebijakan biasanya berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Apabila program atau kebijakan sudah dibuat maka program tersebut harus dilakukan oleh para mobiliastor atau para aparat yang berkepentingan.

Menurut Nurdin Usman (2005:70) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Hanifah Harsono, (2006:67) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan menjadi tindakan kebijakan dari politik administrasi. Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka

penyempurnaan suatu program.

Sedangkan menurut Guntur Setiawan (2009:39) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana. Sedangkan Wibawa (2008) menyatakan bahwa implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program.

Menurut (Grindle, 1980: 7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Model Implementasi Kebijakan

Model pendekatan top-down yang diformulasikan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Leo Agustino (Agustino, 2016) dengan judul *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ialah suatu abstraksi ataupun performansi dari sesuatu penerapan kebijakan yang pada dasarnya secara terencana dicoba buat mencapai kinerja implementasi kebijakan publik yang berlangsung dalam ikatan dengan bermacam variabel. Model ini mengandaikan jika implementasi kebijakan berjalan baik dari keputusan politik yang ada, pelaksana, serta kinerja kebijakan public

Terdapat 6 variabel, bagi Van Meter dan Van Horn, yang pengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik:

1. **Standar dan Tujuan Kebijakan**

Standar dan tujuan kebijakan merupakan dasar utama dalam proses implementasi. Kebijakan publik harus memiliki tujuan yang jelas, terukur, realistis, dan dapat dipahami oleh para pelaksana di tingkat lapangan. Kejelasan standar menjadi pedoman dalam menentukan arah tindakan, prosedur kerja, serta indikator keberhasilan program. Apabila tujuan kebijakan bersifat ambigu atau terlalu umum, maka berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir di antara para pelaksana, sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi tidak konsisten dan sulit dievaluasi. Oleh karena itu, kejelasan standar dan tujuan kebijakan berperan penting dalam memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.

2. **Sumber Daya**

Sumber daya merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya mencakup ketersediaan anggaran, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, informasi yang memadai, serta sarana dan prasarana pendukung. Pelaksana kebijakan memerlukan kompetensi, pelatihan, serta dukungan fasilitas untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Apabila sumber daya terbatas, baik dari segi dana maupun personel, pelaksanaan kebijakan cenderung mengalami hambatan, seperti keterlambatan layanan, penurunan kualitas pelayanan, dan ketidaktepatan sasaran program.

3. **Komunikasi Antar-Organisasi serta Kegiatan Pelaksana**

Komunikasi yang efektif antar lembaga terkait sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan jarang

dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan melibatkan berbagai aktor dan lembaga. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik, kejelasan alur informasi, serta konsistensi penyampaian instruksi. Komunikasi yang buruk dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan, perbedaan pemahaman, dan konflik antar lembaga, yang akhirnya menghambat integrasi pelaksanaan kebijakan.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur birokrasi, pola hubungan kerja, tingkat profesionalisme aparatur, serta budaya organisasi. Struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang tegas, serta prosedur kerja yang baku akan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Sebaliknya, organisasi yang birokratis, kurang fleksibel, atau memiliki budaya kerja yang tidak mendukung dapat memperlambat proses implementasi dan mengurangi kualitas pelayanan.

5. Sikap ataupun Kecenderungan (Disposisi) Para Pelaksana

Disposisi mengacu pada sikap, komitmen, tingkat penerimaan, serta pemahaman para pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Pelaksana yang memiliki komitmen tinggi dan pemahaman yang baik terhadap substansi kebijakan akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebaliknya, apabila pelaksana bersikap apatis, kurang memahami tujuan kebijakan, atau bahkan menolak kebijakan tersebut, maka pelaksanaan kebijakan akan berjalan tidak optimal.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, serta Politik

Lingkungan eksternal turut berperan besar dalam memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Kondisi sosial masyarakat, tingkat pendidikan, budaya lokal, tingkat kemiskinan, serta dinamika politik dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat. Lingkungan yang kondusif akan mempermudah penerimaan kebijakan oleh masyarakat, sedangkan kondisi yang tidak stabil dapat memperbesar resistensi serta menghambat pelaksanaan program.

Program Rehabilitasi

Program rehabilitasi bagi lanjut usia di Kabupaten Ngada, merupakan wujud nyata dari upaya pemenuhan hak-hak dasar lansia, yang dilaksanakan melalui keterlibatan aktif Dinas Sosial dan berbagai instansi terkait. Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek psikososial untuk mendukung proses pemulihan, pemberdayaan, serta reintegrasi sosial lansia ke dalam lingkungan masyarakat. Melalui pelaksanaan Program ATENSI sebagai implementasi dari Permensos Nomor 7 Tahun 2021, Dinas Sosial Kabupaten Ngada berupaya memastikan bahwa lansia yang tergolong miskin, terlantar, atau mengalami keterbatasan fisik memperoleh layanan yang layak dan berkelanjutan.

Adapun kriteria lanjut usia penerima ATENSI yang utama adalah lanjut usia yang mengalami masalah sosial berupa kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, keterpencilan, tuna sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta lanjut usia yang

mengalami hambatan dalam fungsi sosialnya. Hal ini sesuai dengan tujuan rehabilitasi sosial lanjut usia, yaitu untuk memulihkan dan mengembangkan keberfungsian sosial mereka. Berbagai pendekatan dilakukan untuk program rehabilitasi sosial agar lansia tersebut dapat menjalankan peran-peran sosialnya dan dapat berkontribusi dalam masyarakat (Kementerian Sosial dalam Syamsuddin, 2018).

Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap para lansia miskin dan terlantar. Program ini dimulai dengan pemberian bantuan sembako sebagai langkah awal pemenuhan kebutuhan dasar, dilanjutkan dengan asesmen untuk memahami kondisi dan kebutuhan spesifik masing-masing lansia. Dari hasil asesmen tersebut, lansia kemudian dapat diusulkan untuk mendapatkan bantuan sosial lanjutan yang lebih tepat sasaran.

Melalui program ini, lansia berkesempatan menerima berbagai bentuk bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Bagi lansia yang memiliki keterbatasan fisik, ATENSI juga menyediakan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, hingga alat bantu dengar, sesuai hasil asesmen individual. Tidak hanya itu, lansia juga difasilitasi untuk mendapatkan layanan kesehatan, misalnya melalui bakti sosial operasi katarak, di mana seluruh proses dari skrining hingga tindakan medis dibantu sepenuhnya oleh Kementerian Sosial tanpa biaya. Untuk lansia yang masih memiliki semangat dan kemampuan bekerja, program ini memberikan dukungan kewirausahaan, seperti bantuan ternak, guna mendorong kemandirian ekonomi dan keterlibatan aktif di masyarakat.

Dalam model Foster Model (FM), ATENSI memberikan bantuan dana pendidikan kepada lansia yang memiliki tanggungan sekolah, baik cucu maupun anak asuh. Lansia juga berhak mendapatkan bantuan permakanan rutin, baik berupa uang tunai maupun bahan pokok seperti beras dan susu, yang disesuaikan dengan kondisi kesehatannya. Sementara itu, lansia yang termasuk dalam kategori Foster Care (FK) tidak hanya menerima bantuan nutrisi dan kesehatan, tetapi juga dapat diusulkan untuk memperoleh bantuan perbaikan rumah tidak layak huni. Ini merupakan upaya mewujudkan lingkungan hidup yang aman, sehat, dan layak bagi lansia. Program ATENSI menjadi bukti bahwa negara hadir untuk melindungi, mendampingi, dan memberdayakan lansia agar mereka tetap sejahtera, bermartabat, dan berdaya di usia senja.

Berdasarkan pernyataan dari Dinas Sosial, terdapat beberapa program Asistensi Rehabilitasi Sosial yang ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan lansia.

Berikut adalah beberapa poin umum yang dapat ditemukan dalam program seperti ini:

1. Awal Lansia di Tingkat Desa/Kelurahan

Proses dimulai dari identifikasi awal terhadap warga lanjut usia oleh aparat pemerintah desa/kelurahan, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan kader sosial. Identifikasi dilakukan dengan cara pendataan langsung dari rumah ke rumah (door to door) untuk memperoleh gambaran mengenai keberadaan lansia, kondisi fisik, kondisi kesehatan, dan

situasi sosial keluarga.

2. **Pendataan Administratif dan Sosial Ekonomi**
Setelah identifikasi awal, dilakukan pengumpulan data administratif meliputi kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, usia, status perkawinan, serta kondisi tempat tinggal. Selain itu, dilakukan pendataan kondisi sosial ekonomi, seperti sumber penghasilan, kepemilikan aset, dan tingkat ketergantungan lansia terhadap keluarga.
3. **Verifikasi Lapangan (Home Visit)**
Petugas pendamping sosial dan aparat desa melakukan kunjungan langsung ke rumah lansia untuk memverifikasi kondisi sebenarnya. Pada tahap ini, petugas melakukan wawancara langsung, observasi lingkungan tempat tinggal, serta memastikan bahwa data yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.
4. **Validasi Data dengan Sistem Nasional (DTKS)**
Data lansia yang telah dikumpulkan kemudian dicocokkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa lansia belum menerima bantuan sejenis dari program lain secara berlebihan, serta untuk mencegah terjadinya penerima ganda.
5. **Pengusulan Resmi Penerima Manfaat**
Pemerintah desa mengusulkan secara resmi nama-nama lansia yang layak menerima bantuan ke Dinas Sosial Kabupaten. Dinas Sosial kemudian melakukan telaah ulang terhadap data tersebut sebelum mengajukannya ke tingkat provinsi atau pusat untuk mendapatkan persetujuan.
6. **Penerbitan Surat Keputusan (SK) Penerima Manfaat**
Setelah mendapatkan persetujuan, instansi terkait menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang menjadi dasar hukum penetapan lansia sebagai penerima bantuan resmi. Tahap ini menjadi jaminan legalitas dan akuntabilitas program.
7. **Sosialisasi Program kepada Lansia dan Keluarga**
Sebelum bantuan diberikan, petugas melakukan sosialisasi kepada lansia dan keluarganya mengenai jenis bantuan, tujuan program, hak dan kewajiban penerima, serta jadwal penyaluran bantuan.
8. **Penyaluran Bantuan Sosial**
Bantuan disalurkan kepada lansia melalui mekanisme yang telah ditentukan, baik melalui bank penyalur, kantor pos, maupun secara langsung oleh pemerintah desa. Bantuan dapat berupa uang tunai, bantuan pangan, alat bantu, atau layanan sosial lainnya.
9. **Pendampingan Pasca Penyaluran**
Setelah bantuan diterima, pendamping sosial melakukan bimbingan dan pendampingan untuk memastikan bahwa bantuan dimanfaatkan sesuai kebutuhan dasar lansia, serta memberikan edukasi terkait kesehatan, gizi, dan perawatan diri.
10. **Monitoring Berkala oleh Dinas Sosial**
Dinas Sosial melakukan pemantauan secara berkala melalui laporan

dari pendamping sosial dan kunjungan lapangan guna memastikan program berjalan sesuai rencana.

11. Evaluasi Program

Hasil monitoring dianalisis untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan rekomendasi perbaikan program.

12. Pembaruan dan Pemutakhiran Data

Data lansia penerima bantuan secara berkala diperbarui untuk menyesuaikan perubahan kondisi sosial ekonomi, kondisi kesehatan, serta perubahan domisili.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian bersifat kualitatif, yang berfungsi untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial secara deskriptif. Metode ini mengandalkan data deskriptif yang dapat berasal dari kata-kata yang diucapkan atau ditulis oleh individu yang diamati. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk menyingkap situasi sosial dengan mendeskripsikan kenyataan dari data yang dirangkum dalam bentuk kalimat yang didapat melalui teknik pengumpulan informasi yang relevan dari kondisi alam. Penelitian kualitatif mencakup pengumpulan informasi dari hasil wawancara, observasi, studi dokumen, serta analisis data yang tepat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar dan Tujuan Kebijakan

Salah satu faktor dalam pelaksanaan kebijakan berdasarkan Teori Van Meter dan Van Horn adalah adanya tujuan dan kriteria yang ditetapkan dengan baik. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh tujuan dan keadaan yang melatarbelakangi pembuatannya. Dengan demikian, kinerja pelaksanaan kebijakan dapat dievaluasi dengan menggunakan tujuan kebijakan yang sedang berjalan; suatu kebijakan dianggap berjalan efektif apabila tujuan dan pelaksanaannya selaras. (Anggara, kebijakan publik, 2014).

Standar dan tujuan kebijakan merupakan elemen fundamental dalam proses implementasi karena menjadi pedoman bagi para pelaksana dalam menjalankan program di lapangan, sekaligus menjadi acuan bagi kelompok sasaran dalam memahami arah dan manfaat kebijakan yang dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa secara normatif tujuan program rehabilitasi PMKS lanjut usia di Kabupaten Ngada telah dirumuskan secara jelas oleh Dinas Sosial, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial lansia melalui pemberian bantuan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial, serta penguatan fungsi sosial lansia agar tetap memiliki kualitas hidup yang layak dan bermartabat.

Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa tingkat pemahaman lansia sebagai kelompok sasaran terhadap tujuan kebijakan tersebut masih tergolong rendah, sebab sebagian besar lansia hanya mengetahui program ini secara parsial melalui informasi dari tetangga atau aparat desa, tanpa memahami secara utuh maksud dan tujuan program, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun standar dan tujuan kebijakan telah dirumuskan secara jelas di tingkat

pelaksana, namun proses transmisi tujuan kebijakan kepada kelompok sasaran masih belum berjalan secara optimal.

Sumber Daya

Kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang paling penting secara efektif sangat penting bagi keberhasilan proses implementasi kebijakan. Sumber daya dalam implementasi kebijakan meliputi ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya finansial, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program, yang keseluruhannya memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Ngada masih menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pelaksana yang secara khusus menangani program lansia, sehingga beban kerja yang ditanggung oleh staf relatif tinggi dan membatasi jangkauan layanan kepada seluruh lansia yang membutuhkan. Selain keterbatasan sumber daya manusia, penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan anggaran menjadi salah satu alasan belum terpenuhinya kebutuhan seluruh lansia penerima manfaat, yang tercermin dari adanya keterlambatan penyaluran bantuan serta nominal bantuan yang dirasakan belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup lansia. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan lansia penerima manfaat yang menyatakan bahwa bantuan memang membantu kebutuhan sehari-hari, namun jumlahnya terbatas dan belum dapat diandalkan sebagai sumber penghidupan utama.

Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Komunikasi antar badan pelaksana merupakan unsur penting untuk memastikan bahwa program berjalan selaras dan terkoordinasi. Menurut Van Meter dan Van Horn, komunikasi yang efektif akan meminimalkan kesalahan implementasi dan meningkatkan efektivitas kerja. Komunikasi antar badan pelaksana merupakan faktor penting dalam menciptakan koordinasi yang efektif antara berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, baik antara Dinas Sosial, pemerintah desa, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi internal, Dinas Sosial Kabupaten Ngada telah membangun mekanisme koordinasi dengan pemerintah desa melalui rapat koordinasi, komunikasi langsung, serta media komunikasi informal seperti telepon dan pesan singkat, yang bertujuan untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan program. Meskipun secara struktural mekanisme kerja telah berjalan sesuai dengan prosedur, hasil wawancara dengan informan lansia menunjukkan adanya perbedaan persepsi terhadap kinerja badan pelaksana, di mana sebagian lansia penerima manfaat menilai bahwa petugas telah berupaya bekerja sesuai aturan namun prosedur yang ada dinilai relatif panjang dan rumit, sementara lansia yang tidak pernah menerima bantuan cenderung belum memahami cara kerja petugas karena kurangnya interaksi langsung dengan lembaga pelaksana.

Karakteristik Badan Pelaksana

Sebagai pelaksana kebijakan, Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa semua pelaksana harus lebih ketat dan disiplin dalam proses implementasinya, dan bahwa implementasi harus mematuhi standar dan tujuan yang ditetapkan sejak awal. Tentu saja, pelaksana yang demokratis dituntut untuk melakukan ini, artinya agen pelaksana harus menjalankan kebijakan sesuai dengan standar dan tujuan

yang ditetapkan dan bersikap persuasif, yang mengharuskan pelaksana yang dapat membujuk orang lain untuk bergabung. Karakteristik badan pelaksana mencerminkan struktur organisasi, pembagian tugas, prosedur kerja, dan budaya kerja yang berkembang dalam institusi pelaksana kebijakan, yang sangat menentukan kualitas dan konsistensi implementasi kebijakan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Sosial Kabupaten Ngada telah memiliki struktur kerja yang cukup jelas, khususnya bidang rehabilitasi sosial, menunjukkan karakteristik badan pelaksana yang relatif terorganisir dengan pembagian tugas yang jelas antara sekretariat yaitu berperan dalam menyiapkan program dan kegiatan untuk rehabilitasi. Setelah program disiapkan oleh sekretariat, bidang rehabilitasi sosial yang bergerak untuk menyiapkan anggaran dalam rencana kerja anggaran (RKA) dan selanjutnya pendamping rehsos turun lapangan untuk menemui PMKS dan melakukan pendampinga. Melibatkan perangkat desa seperti RT/RW, mengingat pihak desa merupakan unit pemerintahan yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat, khususnya lanjut usia, serta paling mengetahui kondisi sosial ekonomiarganya. Dalam mekanisme penetapan penerima bantuan, salah satu persyaratan utama adalah terdaptarnya calon penerima manfaat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di mana kewenangan untuk mengusulkan data tersebut berada pada pemerintah desa. Pendamping rehabilitasi sosial dapat memberikan usulan, namun apabila nama calon penerima tidak tercantum dalam DTKS, maka usulan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut.

Sikap atau Disposisi Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn, faktor terakhir yang dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan publik diimplementasikan adalah kepribadian atau sikap pelaksana. Dalam melaksanakan suatu kebijakan, disposisi sikap atau karakter pelaksana sangatlah penting. Sebab, hal ini turut mempengaruhi sejauh mana suatu kebijakan diimplementasikan secara efektif. Dedikasi yang tinggi, kejujuran, ketelitian, demokrasi, dan sebagainya merupakan beberapa contoh pola pikir tersebut. Oleh karena itu, mereka yang berkomitmen terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, terutama yang berpihak kepada masyarakat, harus dipilih dan diangkat sebagai profesional pelaksana kebijakan (Anggara, kebijakan publik, 2014).

Disposisi pelaksana merujuk pada sikap mental, komitmen, integritas, dan tanggung jawab para pelaksana dalam menjalankan kebijakan, yang pada dasarnya menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara internal, Dinas Sosial Kabupaten Ngada telah berupaya menanamkan nilai-nilai profesionalisme, empati sosial, dan tanggung jawab moral kepada seluruh staf dalam melayani kelompok lansia, sebagaimana tercermin dalam arahan pimpinan kepada staf untuk selalu mengedepankan sikap humanis dalam memberikan pelayanan. Namun demikian, persepsi lansia terhadap sikap pelaksana masih beragam, di mana sebagian lansia merasa terbantu dan dilayani dengan baik, sementara sebagian lainnya merasa belum mendapatkan perhatian yang memadai. Perbedaan pengalaman ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif disposisi pelaksana tergolong positif, namun implementasinya di lapangan belum sepenuhnya merata.

Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Karena lingkungan merupakan faktor yang melatarbelakangi suatu kebijakan, maka faktor politik, sosial, dan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap seberapa baik kebijakan tersebut diimplementasikan. Kebutuhan lingkungan merupakan alasan keberadaan suatu kebijakan. Kabupaten Ngada menunjukkan bahwa secara sosial, masyarakat masih memiliki budaya saling membantu, namun kondisi ekonomi sebagian besar lansia masih tergolong rendah. Banyak lansia hidup dari hasil kebun kecil dan bantuan keluarga, sehingga sangat bergantung pada bantuan pemerintah. Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah juga menjadi tantangan dalam menjangkau lansia terutama dalam hal pendataan, distribusi bantuan, dan pemantauan. Sementara itu, dari sisi politik, meskipun Dinas Sosial menegaskan bahwa program bantuan bersifat non-politis, namun dalam persepsi masyarakat masih terdapat anggapan bahwa bantuan sosial memiliki keterkaitan dengan kepentingan tertentu.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Program Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada lanjut usia di Dinas Sosial Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut telah memiliki landasan tujuan yang jelas, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, kualitas hidup, serta keberfungsian sosial lanjut usia. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pemahaman kelompok sasaran terhadap tujuan program masih tergolong terbatas, karena sebagian besar lanjut usia hanya memaknai program tersebut sebagai bentuk bantuan sosial semata, tanpa memahami orientasi jangka panjang dari program rehabilitasi sosial, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara rumusan kebijakan dengan realitas pemahaman masyarakat.

Dari sisi sumber daya, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam hal ketersediaan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, maupun ketercukupan sarana dan prasarana pendukung. Jumlah petugas yang terbatas berdampak pada belum optimalnya proses pendataan, pendampingan, serta pengawasan terhadap seluruh lanjut usia yang membutuhkan layanan. Keterbatasan alokasi anggaran juga berpengaruh terhadap besaran bantuan yang diterima serta masih terjadinya keterlambatan dalam proses penyaluran bantuan, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepuasan dan rasa aman kelompok sasaran.

Dalam aspek komunikasi antar badan pelaksana, koordinasi antara Dinas Sosial dengan pemerintah desa telah terbangun melalui mekanisme tertentu, namun efektivitas komunikasi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok lanjut usia sebagai penerima manfaat. Informasi mengenai jadwal penyaluran bantuan, jenis bantuan, dan prosedur program sering kali tidak diterima secara langsung oleh lansia, sehingga mereka bergantung pada informasi tidak resmi yang diperoleh dari keluarga atau tetangga. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian, serta memperlemah posisi lansia dalam

mengakses hak-hak sosialnya.

Karakteristik badan pelaksana menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Ngada telah memiliki prosedur kerja yang relatif terstruktur melalui tahapan pendataan, verifikasi, penetapan penerima manfaat, hingga monitoring dan evaluasi. Namun dalam pelaksanaannya, sebagian lanjut usia masih merasakan bahwa proses tersebut berjalan lambat dan belum sepenuhnya transparan. Lansia yang belum pernah menerima bantuan juga cenderung tidak memahami mekanisme kerja lembaga pelaksana karena minimnya interaksi langsung, sehingga muncul persepsi kurangnya keterbukaan dalam proses implementasi kebijakan di tingkat lapangan.

Dari sisi sikap atau disposisi pelaksana, dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan para pelaksana kebijakan telah menunjukkan komitmen untuk melayani dengan pendekatan empati, tanggung jawab, dan kepedulian sosial terhadap kelompok lanjut usia. Namun demikian, pengalaman yang dirasakan masyarakat tetap beragam, di mana sebagian lansia merasakan pelayanan yang cukup baik, sementara sebagian lainnya merasa kurang mendapat perhatian yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi sikap profesional dan kualitas pelayanan masih perlu terus ditingkatkan agar pelayanan dapat dirasakan secara adil dan merata.

Selain faktor internal, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi program. Kondisi ekonomi lanjut usia yang umumnya berada pada kategori rentan menjadikan program rehabilitasi sosial sebagai kebutuhan yang sangat mendesak. Di sisi lain, kondisi geografis Kabupaten Ngada yang luas dan sebagian wilayah sulit dijangkau menjadi tantangan teknis dalam proses pendataan, distribusi bantuan, dan pemantauan. Persepsi masyarakat yang masih mengaitkan bantuan sosial dengan kepentingan tertentu juga menunjukkan bahwa dinamika sosial dan politik lokal turut mempengaruhi cara masyarakat memandang dan memaknai pelaksanaan program tersebut.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Rehabilitasi PMKS pada lanjut usia di Dinas Sosial Kabupaten Ngada telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh lansia yang membutuhkan, baik dari aspek ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran, maupun kualitas pelayanan yang diberikan, sehingga masih diperlukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaan program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Princeton University Press.
- Harsono, H. (2006). *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Grafindo Jaya.
- Wahab, S. A. (2010). *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Rineka Cipta
- Ismaya, N. R. P., & Widyastuti, Y. Y. (2025). Implementasi Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) pada Lansia di Kecamatan Pabuaran.

Ournal of Geopolitics and Public Policy (JOGPP), 48–71.

Wijayanti, S., & Prabawati, I. (2020). Implementasi Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto. *Publika*, 8(2).